

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi perlu untuk dapat menjaga kualitas proses demokrasi. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara.¹

Pengertian demokrasi secara sempit di kemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.²

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.³

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara

¹Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol II No.1, Juni 2009, hlm. 15

²Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 14

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 293

umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.⁴

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.⁵

Kebebasan politik bagi setiap warga negara termasuk dalam kebebasan yang menyangkut dengan kebebasan hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 56

⁵ *Ibid.* Hal. 57

tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan appaun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas.

Wujud dari implementasi Undang-Undang tersebut adalah adanya partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik. Partisipasi politik aktif masyarakat menunjukkan adanya kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang bertumpu hanya pada output. Masyarakat hanya bertumpu pada output yakni adanya kasuscalon tunggal yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu ada juga sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif ataupun pasif. Kelompok ini muncul berdasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut juga sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput).⁶

Agar dapat mendukung proses politik yang tepat diperlukan proses pendidikan politik, sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi – orientasi politik pada individu.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan

⁶A.A Said Gataru dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 101

dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini, maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe meliputi partisipasi aktif, pasif (apatis), militan (radikal) dan sangat pasif (pada output politik).⁷

Pada umumnya di negara-negara demokrasi, dianggap bahwa partisipasi politik masyarakat yang tinggi, merupakan hal yang baik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran serta mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin turut serta untuk melibatkan diri. Tingginya partisipasi politik juga mengindikasikan bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah, dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena memberikan gambaran masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Jika masyarakat tidak tanggap terhadap kebijakan pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan kepentingan politik kelompok mengesampingkan kehendak dan aspirasi rakyat. Keadaan politik yang seperti ini menjadi salah satu ciri lemahnya kekuasaan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik yang rendah, menunjukkan legitimasi yang juga rendah.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

⁷A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 285

mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara itu meliputi mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.⁸

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini, maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe meliputi partisipasi aktif, pasif (apatis), militan (radikal) dan sangat pasif (pada output politik).⁹

Gagasan otonomi daerah melekat pada pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang sangat berkaitan dengan demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan baik tingkat lokal maupun ditingkat nasional. Agar demokrasi bisa terwujud maka daerah harus memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.¹⁰ Sehingga muncul konsep pembaruan kepala daerah yang dirumuskan sebagai transformasi kepala daerah yang hendak menegaskan bahwa pembaruan bermakna sebagai tidak lagi bekerja dengan skema dan watak yang lama, melainkan telah bekerja dengan skema dan watak yang baru. Proses pembaruan haruslah dapat memberikan kepastian bahwa nasib rakyat akan berubah menjadi lebih baik lagi. Pembaruan kepala daerah

⁸ *Ibid*, hlm. 287

⁹*Ibid*. hlm. 289

¹⁰ Dadang Juliantara, *Pembaruan Kabupaten*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2004), hlm. 126

juga berarti “perombakan” menyeluruh yang dimulai dari paradigma seluruh elemen yang ada atau mengorganisir seluruh sumber daya yang ada agar mengabdikan pada kepentingan masa rakyat.¹¹

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Actor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain: pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.¹²

Adanya pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Pemerintah di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintah daerah dan juga akan terciptanya respon yang baik dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam memilih atau dipilih. Setiap warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik. Warga Negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.¹³

¹¹*Ibid*, hal 3

¹²<https://www.kajianpustaka.com> diakses 15 Januari 2021

¹³<https://www.kajianpustaka.com> diakses 15 Januari 2021

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan orang perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang berkaitan dengan sikap politik. Yakni berkaitan dengan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.¹⁴ Kegiatan politik itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya.

Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi sebesar 69,53% dari total DPT sebanyak 384.203 dan 651 DPT bagi penyandang disabilitas yang terbagi kedalam 1.103 TPS di Kota Jambi. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Jambi 2018 ini meningkat dari pemilihan-pemilihan sebelumnya dan lebih besar bila dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2015 lalu yang hanya 62,47 %. Kemudian lebih besar dibandingkan pada pemilihan Walikota Jambi 2013 lalu partisipasi pemilih sebesar 62,7%, artinya, terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pilwako tahun ini.¹⁵

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pilwako memang menjadi suatu yang positif bagi Pilwako Kota Jambi periode 2018-2023, namun pemilih yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pilwako tetap menjadi suatu masalah yang harus

¹⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Op. Cit*, hlm. 4

¹⁵ <https://kota-jambi-kpu.go.id/> diakses 21 Februari 2021

segera diatasi agar tidak terjadi pada Pilwako atau Pilkada berikutnya. Tidak berpartisipasinya masyarakat Kota Jambi dalam Pilwako disebabkan sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilih karena sedang berada di luar Kota Jambi saat Pilwako digelar, kemudian ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti kampanye masing-masing calon sehingga tidak adanya pilihan calon walikota dan calon wakil walikota baik bagi sebagian masyarakat tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk golput, selain itu masyarakat yang sedang sakit parah menjadi bagian dari pemilih yang tidak berpartisipasi politik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irtanto bahwa hasil penelitian menunjukkan partisipasi cukup tinggi pada pemilihan Kota Blitar disebabkan pula karena faktor strategi komunikasi terutama sosialisasi yang diterapkan oleh KPUD cukup efektif. Media tv lokal cukup efektif dalam menjalankan peran sosialisasi pemilihan Kota Blitar.¹⁶ Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirahmat mengatakan bahwa Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Kota Makassar di Kelurahan Tamangappa Kecamatan Manggala Kota Makassar cenderung sangat rendah. Partisipasi politik ditinjau dari status sosial ekonomi menunjukkan bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat.¹⁷

¹⁶Irtanto. Analisis Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Walikota Blitar dengan Pendekatan Komunikasi Politik dan Budaya Politik, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol.14, No. 1. 2011

¹⁷Wirahmat, Hardiman. Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Tinjau Dari Status Sosial Ekonomi (Studi Kelurahan Tamangappa Kota Makassar). *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 No. 1, 2020,

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irtanto dan Wirahmat adalah pada objek penelitiannya dan pada tinjauannya. Objek penelitian ini yaitu di Kota Jambi sementara objek penelitian Irtanto di Kota Blitar dan Wirahmat di Kelurahan Tamangapa Kota Makassar. Sedangkan jika dilihat dari tinjauannya, penelitian ini ditinjau dari sisi efektivitas sosialisasi sementara penelitian Irtanto melihat partisipasi politik dengan pendekatan komunikasi politik dan budaya politik dan penelitian Wirahmat ditinjau dari status sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Partisipasi Politik dalam Pemilihan Walikota Kota Jambi Tahun 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana partisipasi politik pada pemilihan Walikota Kota Jambi tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik pada pemilihan Walikota Kota Jambi tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan untuk mengetahui serta menambah pengetahuan mengenai partisipasi politik pada pemilihan Walikota Kota Jambi serta mengembangkan ilmu didapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah daerah sebagai saran atau masukan dalam partisipasi politik pada pemilihan Walikota Kota Jambi berikutnya.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Partisipasi Politik

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Dilihat dari asal katanya, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.¹⁸

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang

¹⁸ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 141-142

yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara dibagi dua, yaitu memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.¹⁹

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara dibagi dua, yaitu memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.²⁰

Partisipasi politik lebih dialamatkan pada aktivitas masyarakat (warga negara) dalam turut memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan penguasa dan pelaksanaan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 142-143

²⁰ *Ibid*, hlm. 143

segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah). Adapun beberapa kriteria dari partisipasi politik adalah:²¹

- a) Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
- b) Kegiatan politik warga negara biasa atau orang perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung (perantara).
- c) Kegiatan tersebut bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan maupun dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
- d) Kegiatan tersebut diarahkan pada upaya memengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
- e) Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) ataupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
- f) Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia (*locus internal*) yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya paksaan atau tekanan

²¹ *Ibid.* hlm. 144

dari luar, karena partisipasi seperti bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap. Partisipasi yang kekal adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sendiri karena merasa bahwa dirinya bagian dari kehidupan negara yang dituntut untuk turut memikirkan dan memajukan kehidupan negaranya.²²

Partisipasi politik lebih dialamatkan pada aktivitas masyarakat (warga negara) dalam turut memikirkan kehidupan negara. Kegiatan partisipasi politik tertuju pada dua subjek, yaitu: pemilihan penguasa, dan pelaksanaan segala kebijaksanaan penguasa (pemerintah).²³

Bentuk partisipasi politik terhadap subjek kedua sangat beragam atau bersifat heterophulus, yaitu bergantung pada latar belakang pendidikan, kualitas rujukan status sosial yang berada pada individu atau kelompok. Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik (political behaviour) warga negara yang berwujud dalam perilaku, baik secara psikis maupun secara fisik.²⁴

Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni (pure participation) tanpa adanya paksaan. Pada negara-negara totaliter, partisipasi politik dipola menurut kebijaksanaan elite yang berkuasa (elite pemerintah, elite partai). Partisipasi semacam ini dimobilisasikan untuk tujuan ideologi (ideologi Marxis atau komunisme). Terwujudnya partisipasi murni menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antara elite infrastruktur (elite berkuasa) dengan jalinan

²² *Ibid*, hlm. 143

²³ *Ibid*, hlm. 144

²⁴ *Ibid*, hlm. 145

harmonis. Untuk mewujudkan partisipasi murni, masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan komunikasi (termasuk transformasi nilai-nilai) dan informasi tentang langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.²⁵

1.5.2. Indikator Partisipasi Politik Masyarakat

Pada dasarnya, cara mengukur partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya dalam hal apa saja masyarakat tersebut melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bentuk yang dipilih oleh masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik beranekaragam, seperti aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, melakukan lobi politik, aktif dalam berorganisasi sosial serta berusaha membangun jaringan politik.

Pengukuran partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang diikuti, diantaranya adalah:²⁶

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*. hlm. 151

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya bentuk lain dari partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat adalah:²⁷

a. Partisipasi politik konvensional

Partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk dari partisipasi konvensional ini meliputi membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, pemberian suara (*voting*), komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative serta diskusi politik.

b. Partisipasi politik non konvensional

Partisipasi Politik Non Konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan. Bentuk nonkonvensional, misalnya petisi, kekerasan, dan revolusioner.

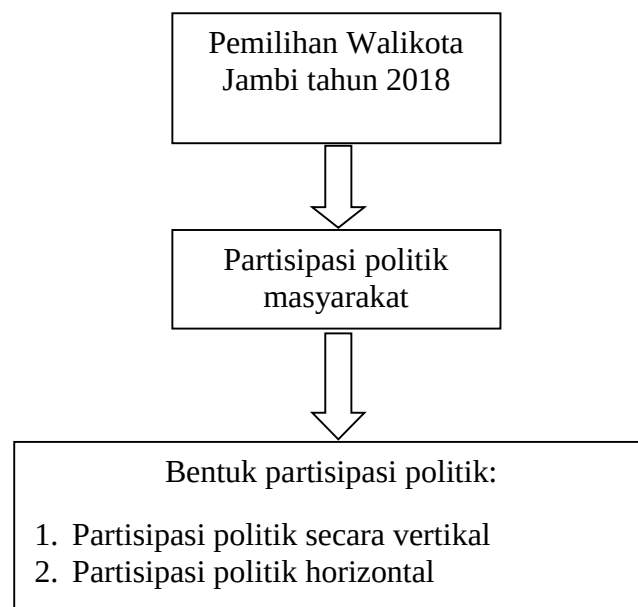
Bagi individu secara pribadi, partisipasi politik bertujuan mengembangkan kepribadian politik (*political personality*) yang memiliki dasar moral berdasarkan norma dan nilai-nilai yang memedomani terhadap sikap perilaku sebagai warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.

1.6. Kerangka Berpikir

²⁷ Yalvema Miaz, *Op. Cit.* hlm. 23-24

Pemilihan Walikota merupakan salah satu bagian dari pemilihan Kepala Daerah yang tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pemilu di wilayah Kota Jambi. Apabila partisipasi rendah maka kesadaran masyarakat akan politik di Kota Jambi juga masih rendah, begitu sebaliknya.

Partisipasi masyarakat tentu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Bentuk partisipasi secara vertikal berarti masyarakat mengikuti segala arahan dan kegiatan yang dilakukan oleh para atasan, seperti im sukses partai maupun calon Walikota. Selanjutnya partisipasi dalam bentuk horizontal dilakukan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, maka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Jambi tahun 2018 meliputi partisipasi politik vertikal dan partisipasi politik secara horizontal. Partisipasi politik vertikal diwujudkan dengan cara membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, mengikuti kegiatan kampanye, melakukan pemberian suara (*voting*), serta diskusi politik.

Selanjutnya partisipasi politik horizontal diwujudkan dengan cara melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan masyarakat lainnya, serta mencari informasi mengenai calon pemilih secara mandiri dengan tujuan untuk mengetahui seluk beluk calon pemimpin yang akan mereka pilih.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁸

²⁸John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4-5.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini akan meneliti sebuah fenomena yang mengharuskan peneliti ikut terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, dan karena kualitatif lebih bisa mendapatkan data berupa kata tertulis ataupun lisan dari pihak yang bertanggung jawab.

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di Kota Jambi. Adapun alasan penelitian ini dilakukan di tempat tersebut untuk mengetahui partisipasi politik oleh masyarakat Kota Jambi dalam pemilihan Walikota Jambi tahun 2018-2023.

1.7.3. Fokus dan Dimensi Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa “fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)”. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.²⁹

Fokus dari penelitian ini adalah peneliti berfokus pada sejauh mana partisipasi politik oleh masyarakat Kota Jambi dalam pemilihan Walikota Jambi tahun 2018-2023.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 209.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³¹ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini menjadi penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari foto, daftar kegiatan, dokumen-dokumen atas laporan dan lain-lain.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data

³⁰*Ibid*, hlm. 225

³¹ *Ibid*, hlm. 225.

(informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.³² Teknik penentuan informan ini adalah jenis data primer. Data primer di peroleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian di lapangan. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian adalah :

1. Ketua KPU Kota Jambi sebanyak 1 orang.
2. Pimpinan Redaksi KPU Kota Jambi sebanyak 1 orang.
3. Anggota KPU Kota Jambi sebanyak 1 orang.
4. Masyarakat Kota Jambi sebanyak 5 orang.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data primer diantaranya :

1. Wawancara (*interview*)

³² Pahrudin, Makmun Wahid,dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, hlm. 24.

Esterberg mengatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.³³

Kegiatan wawancara yang peneliti lakukan menggunakan jenis wawancara semi-struktur maksudnya adalah jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan pemrasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan.³⁴

2. Observasi

Menurut Angrosino Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena dilapanan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa) peneliti sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.³⁵ Sedangkan menurut

³³*Ibid.*, hlm.231-232

³⁴*Ibid.*, hlm. 233

³⁵John W. Cresswell, *Op. Cit*, hlm. 231.

Marshall melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.³⁷ Adapun dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu seperti foto, daftar hadir, laporan kegiatan, dokumen, dan lain-lain.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman di Sugiyono yaitumeliputi tahap pemngumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- 1) Pengumpulan Data, data dikumpulkan diawali dengan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Kota Jambi. Kemudian di lanjutkan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Peneliti juga mengambil dokumentasi untuk mendukung data penelitian.

³⁶Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 226.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 33.

- 2) Reduksi Data, mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya peningkatan aksesibilitas yang disediakan.
- 3) Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang dilakukan selanjutnya.
- 4) Penarikan Kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.

1.6.7. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif,. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan

karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.³⁸

³⁸ Pahrudin, Makmun Wahid,dkk.,*Op.Cit*, hlm.18

